



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

RENCANA KERJA

TAHUN ANGGARAN 2024

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga **Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2024** telah dapat diselesaikan penyusunannya. Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2024, mempunyai arti strategis karena di dalamnya memuat uraian program dan kegiatan, yang dirumuskan berdasarkan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis diharapkan dapat berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang. Penyusunan Rencana Kerja merupakan faktor mendasar sebagai upaya mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan dimana semua kebijakan, program, sasaran dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Penyusunan Renja Tahun 2024 merupakan kewajiban bagi setiap Perangkat Daerah. Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang disamping berfungsi sebagai pedoman kerja dan dokumen, juga diharapkan menyatukan visi, misi, persepsi, dan strategi seluruh aparat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang dalam membina, melayani dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan menuju masyarakat yang mandiri, serta untuk dapat bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang. Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota

Magelang Tahun 2024 memuat penjabaran program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan pada tahun tersebut.

Berhasil dan tidaknya target yang telah ditentukan dalam Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang tidak terlepas dari integritas moral dan kerjasama dari semua pihak, termasuk peran serta masyarakat. Renja yang telah tersusun ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2024 untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Selain itu juga dapat berguna bagi peningkatan kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang.

Magelang, Juli 2023

KEPALA BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA MAGELANG



SUSILOWATI, SE, MT, M.Sc
Pembina Utama Muda
NIP. 19721101 199803 2 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU ...	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang.....	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang.....	38
2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	42
2.3.1 Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.....	42
2.3.2 Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Perangkat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	44
2.3.3 Dampaknya terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap Capaian Program Nasional	44
2.3.4 Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan ...	45
2.3.5 Rekomendasi Strategis dalam Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2024	46
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	46
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	71
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	73
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	73
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang.....	735
3.3 Program dan Kegiatan	77
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH....	99
BAB V PENUTUP	123

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Capaian Indikator Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2022.....	8
Tabel 2.2.1 Faktor Penyebab Tidak Tercapai, Tercapai dan Capaian Melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.....	11
Tabel 2.2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2022 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang.....	14
Tabel 2. 3 Sasaran Strategi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	38
Tabel 2. 4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang.....	40
Tabel 2. 4. 1 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024 Kota Magelang	48
Tabel 2. 5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kota Magelang.....	72
Tabel 3. 1 Korelasi Prioritas Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kota Magelang.....	74
Tabel 3. 2 Tujuan dan Sasaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.....	75
Tabel 3. 3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kota Magelang Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.....	79
Tabel 4. 1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.....	100

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan pada tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari Renstra. Dokumen Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah baik yang langsung dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang memuat perencanaan tahunan dalam rangka mewujudkan perencanaan yang terpadu dan terarah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang efektif dan efisien sesuai dengan prioritas dan sasaran penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah.

Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Renja. Renja merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh karena itu setiap Perangkat Daerah harus merumuskan Renja secara transparan, responsif, efisiensi, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2024 disusun berpedoman pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta memperhatikan sistematika penyusunannya berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ini

disusun dengan upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang sesuai dengan tugas dan fungsinya serta dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kota Magelang.

Penyusunan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang memuat program, kegiatan, alokasi dan kelompok sasaran dengan indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsinya, dengan tahapan penyusunan berupa persiapan penyusunan Renja; persiapan Rancangan Awal Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang yang berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang tahun lalu dan evaluasi hasil Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang tahun berjalan; penyusunan Rancangan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang; pembahasan Rancangan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang; perumusan Rancangan Akhir Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang; Verifikasi Rancangan Akhir Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang.

Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2024 merupakan dokumen Perencanaan Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang untuk tahun ketiga periode Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026 yang menjadi pedoman penyusunan Renja dan Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2024 dalam rangka mengoptimalkan pencapaian target Renstra dan RPJMD yang diselaraskan dengan pencapaian dan sasaran pembangunan nasional. Selain itu, penyusunan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Magelang tahun 2024, Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang, Renja K/L, dan Renja Tahun 2024 BPKAD Provinsi Jawa Tengah. Renja harus selaras dengan dokumen-dokumen perencanaan tersebut, utamanya yang berkaitan langsung dengan urusan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2024 berdasarkan pada beberapa peraturan sebagai landasan atau rujukan, yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2020 tentang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2023;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Magelang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031;
12. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026;
13. Peraturan Walikota Magelang Nomor 86 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang adalah dokumen perencanaan untuk 1 (satu) tahun yang mengacu pada Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang dengan periode 5 (lima) tahun yang memiliki maksud memberikan arah sekaligus sebagai acuan dalam penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan secara umum di lingkup Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Maksud disusunnya Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2024 adalah untuk dijadikan dasar serta acuan bagi Penyusunan Program dan Kegiatan Tahunan, serta guna mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Magelang Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan penyusunan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang adalah:

- a. Untuk mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam 1 (satu) tahun yang tersusun dalam rencana.

- b. Untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan program/kegiatan selama 1 (satu) tahun oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang.
- c. Sebagai pedoman dalam penyusunan dan evaluasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan tahunan yang mengarah pada pencapaian Rencana Strategis dan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang;
- d. Menjamin kesesuaian kegiatan lanjutan maupun kegiatan baru sehingga dapat menjalankan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta dapat mengambil langkah-langkah/kebijakan sesuai dengan kewenangannya.
- e. Sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun yang akan datang.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka sistematika dokumen Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang tahun 2024 meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang.

- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang
- 3.3 Program dan Kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai apakah pelaksanaan rencana pembangunan sudah sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan, untuk mengetahui kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan di lapangan dan untuk bahan pertimbangan apakah program dan kegiatan tersebut sudah mencapai target sasaran sehingga tidak perlu lagi untuk direncanakan pada tahun berikutnya. Fokus utama evaluasi diarahkan pada pelaksanaan rencana pembangunan dan pencapaian target kinerja berdasarkan tolak ukur yang ditetapkan pada saat penyusunan perencanaan.

Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang tahun lalu merupakan kegiatan yang dilakukan untuk melihat tingkat keberhasilan pelaksanaan Renja pada tahun tersebut. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang disusun berdasarkan analisis kondisi objektif permasalahan yang timbul. Dari permasalahan tersebut yang kemudian disusunlah suatu program dan kegiatan pada tahun selanjutnya yakni tahun 2024.

Sebagaimana termaktub dalam sistematika Renja Perangkat Daerah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa perlu dilakukannya evaluasi pelaksanaan dan capaian Renja tahun lalu. Evaluasi terhadap Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2022 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan. Penyusunan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2024 memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut:

- a. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;

- b. Tujuan yang dikehendaki;
- c. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
- d. Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya serta subag/subid pelaksana.

Adapun capaian indikator kinerja pada Renja tahun 2022 sebagai bahan evaluasi bisa dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 1
Capaian Indikator Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2022

No .	Tujuan/ Sasaran	Indikat or Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian
1.	Tujuan : Meningkatnya kualitas pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Sasaran : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah Sasaran : Meningkatnya kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Capaian Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan Barang Milik Daerah	114,14 %	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1.Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah Bidang Anggaran 2.Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah Bidang Perbendaharaan 2.Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah Bidang Akuntansi	102,74 % 170,80 % 100%
				Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Penganggaran sesuai ketentuan	102,74 %
				Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase penatausahaan keuangan sesuai ketentuan	170,80 %
				Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase LK OPD yang sesuai dengan ketentuan	100.00 %

				Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100,00 %
				Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Cakupan Pengelolaan BMD	116,67 %
				Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Cakupan perencanaan, pemanfaatan, pengamanan, penatausahaan, dan pemindahtanganan BMD	140,65 %
2.	Tujuan : Meningkatkan kemandirian keuangan daerah	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	149,42 %	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	149,43 %
	Sasaran : Tercapainya peningkatan pendapatan daerah	Rasio PAD terhadap pendapatan daerah	147,29 %	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah	169,62 %

Sumber : LKjIP 2022 BPKAD Kota Magelang

Dari hasil evaluasi kinerja pada Tahun 2022, tidak ada kegiatan yang direncanakan namun tidak dapat dilaksanakan karena mengalami rasionalisasi anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan program maupun kegiatan BPKAD Kota Magelang pada tahun 2022 telah tersusun dengan baik. Jika dilihat dari capaian indikatornya yang rata-rata 100% bahkan lebih bisa pula dikatakan jika program dan kegiatan yang ada di BPKAD Kota Magelang pada Tahun 2022 telah berhasil menunjang terhadap pencapaian indikator-indikator kerjanya.

Sesuai dengan hasil evaluasi di atas serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2022, maka dapat dikatakan bahwa Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja sebesar 100%. Dalam artian bahwa seluruh Program dan Kegiatan telah berhasil mencapai target yang ditentukan. Bahkan

terdapat 3 Program dan 4 Kegiatan yang capaian indikator kerjanya melebihi dari target, yaitu :

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan capaian indikator kerjanya masing-masing sebagai berikut :
 - Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah Bidang Anggaran sebesar 102,74%
 - Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah Bidang Perbendaharaan sebesar 170,80%
2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan capaian indikator kinerja sebesar 111,40%
3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan capaian indikator kinerja sebesar 169,61%
4. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah dengan capaian indikator kinerja sebesar 102,74%
5. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah dengan capaian indikator kinerja sebesar 170,80%
6. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan capaian indikator kinerja sebesar 140,65%
7. Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah dengan capaian indikator kinerja sebesar 169,62%.

Hal tersebut tentunya tidak lepas dari beberapa faktor yang mendukung, di antaranya adalah :

1. Tersedianya sistem penganggaran yang terpadu dari Kementrian yang mempermudah dalam teknis penyusunan dokumen penganggaran.
2. Media sosial yang selalu update dalam memberikan akses informasi, sosialisasi, bimtek atas ketentuan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan dan Barang Milik Daerah
3. Pemanfaatan teknologi sistem informasi yang terintegrasi serta yang memberikan informasi secara transparan, terupdate dan akuntabel, yang mempermudah dalam pengumpulan, penarikan data, serta pelaksanaan transaksi keuangan yang diperlukan guna penyusunan laporan-laporan yang dibutuhkan.
4. Koordinasi yang lebih intensif dengan pihak-pihak terkait.
5. Timeline perencanaan yang lebih efektif dan efisien.

6. Adanya pengembangan-pengembangan pada Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah yang memudahkan Wajib Pajak/Wajib Retribusi untuk menyetorkan pajak/retribusi daerah yang menjadi kewajibannya.
7. Kebijakan penerapan transaksi non tunai.
8. Stimulan kepada masyarakat untuk pro aktif membayar pajak daerah melalui penyelenggaraan atau even Gebyar Pajak Daerah.

Namun terdapat pula beberapa program dan kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang diatas yang capaiannya sesuai target, yaitu:

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
 - Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah.

Hal tersebut tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Komitmen yang sama dari semua pihak pengelola keuangan daerah dalam proses penyusunan laporan keuangan.
2. Semua perangkat daerah telah paham dan patuh terhadap ketentuan yang ada dalam akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.
3. Sosialisasi atau pembinaan pengelola keuangan tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Intern (SPI) secara intensif.

Tabel 2. 2.1
Faktor Penyebab Tidak Tercapai, Tercapai dan Capaian Melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang

No.	Faktor Capaian Program/Kegiatan Tidak Sesuai Target	Faktor Capaian Program/Kegiatan Sesuai Target	Faktor Capaian Program/Kegiatan Melebihi Target	Solusi yang dilakukan
1.	Masih kurangnya pemahaman SDM Pengelola	Dukungan OPD yang memiliki keterkaitan fungsi	Pemanfaatan teknologi sistem informasi yang terintegrasi	Lebih mengintensifkan lagi pengelolaan keuangan dan

	Keuangan terhadap pencatatan dan penyajian data pada dokumen-dokumen pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan dan barang secara menyeluruh.	pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.	serta yang memberikan informasi secara transparan, terupdate dan akuntabel, yang mempermudah dalam pengumpulan, penarikan data.	barang milik daerah secara transparan dan akuntabel
2.	Belum semua OPD menggunakan ASB dan HSPK dalam penyusunan anggaran.	Tersedianya sistem penganggaran yang terpadu dari Kementerian yang mempermudah dalam teknis penyusunan dokumen penganggaran.	Komitmen pemerintah daerah dalam pelaksanaan anggaran berbasis kinerja.	Lebih intensif dalam melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada para pejabat pengelola keuangan perangkat daerah.
3.	Pengurus barang yang sering berganti personilnya.	Diadakan pembinaan/ bimbingan teknis terkait SimAset secara kontinyu.	Penyampaian Laporan Barang Milik Daerah dari OPD belum tepat waktu sehingga mengakibatkan pengelolaan BMD yang kurang optimal.	Lebih intensif dalam melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada para pejabat pengelola barang di OPD.
4.	Beberapa pemungutan pajak daerah terkendala perijinan sehingga berakibat kehilangan potensi PAD. Dalam pelayanan pajak daerah secara online terdapat sistem informasi manajemen	Semakin tergalinya potensi-potensi PAD (Pendapatan Asli Daerah) sehingga bisa menambah penerimaannya.	Kebijakan pemerintah dalam penetapan cuti bersama yang berpengaruh terhadap kenaikan jumlah wisatawan pada kunjungan ke hotel, restoran dan tempat-tempat hiburan.	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan PAD melalui peningkatan kontribusi BUMD yang berupa pengelolaan BUMD secara profesional lagi. - Diperlukan upaya untuk meningkatkan kinerja pendapatan

	yang belum terintegrasi sehingga dalam rangka penyajian data penerimaan pendapatan mengalami kesulitan			daerah dengan menggali potensi-potensi pendapatan yang ada.
--	--	--	--	---

Sumber: LKjIP Tahun 2022 BPKAD Kota Magelang

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang tahun lalu dan capaian Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2023
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan (TPK) perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi	100(%)	100%	96.67%	98.33%	101.72%	100(%)	100(%)	100.00%

				umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan.								
01	201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan ketersediaan (CK) dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD	100 (%)	100%	100%	100%	100.00%	100 (%)	100 (%)	100.00%
01	201	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Daerah Dokumen Perencanaan Perangkat	3 Dokumen	3 Dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100.00%	3 Dokumen	3 Dokumen	100.00%
01	201	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100.00%	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%

					Dokumen RKA-SKPD								
01	201	03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100.00%	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%
01	201	04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100.00%	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%
01	201	05		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100.00%	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%

01	201	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan	3 laporan	3 laporan	100.00%	30 Laporan	30 Laporan	100.00%
01	202			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Laporan (CL) administrasi keuangan Perangkat Daerah sesuai aturan	100 (%)	100%	1 00%	1 00%	100.00%	100 (%)	100 (%)	100.00%
01	202	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/Bulan	55 Orang/bulan	55 Orang/bulan	55 Orang/bulan	100.00%	55 Orang/bulan	55 Orang/bulan	100.00%
01	202	03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifik	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan	24 Dokumen	24 dokumen	24 dokumen	24 dokumen	100.00%	24 dokumen	24 dokumen	100.00%

				asi Keuangan SKPD	Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								
01	202	07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	100.00%	18 Laporan	18 Laporan	100.00%
01	205			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan laporan (CL) administrasi kepegawaian PD sesuai aturan	100 (%)	100%	100%	100%	100.00%	100 (%)	100 (%)	100.00%
01	205	10		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah kegiatan pameran hasil pengelolaan keuangan daerah	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100.00%	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100.00%

01	2016			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Ketersediaan (CK) administrasi umum Perangkat Daerah	100 (%)	100%	100%	100%	100.00%	100 (%)	100 (%)	100.00%
01	2016	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	35 Paket	35 Paket	35 Paket	35 Paket	100.00%	35 Paket	35 Paket	100.00%
01	2016	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	0 Paket	1 paket	2 paket	200.00%	4 Paket	4 Paket	100.00%
01	2016	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	80 Paket	80 Paket	80 Paket	80 Paket	100.00%	80 Paket	80 Paket	100.00%
01	2016	05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	15 Paket	15 Paket	15 Paket	100.00%	15 Paket	15 Paket	100.00%

01	2016	06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100.00%	3 Dokumen	3 Dokumen	100.00%
01	2016	07		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	25 Paket	22 Paket	22 Paket	22 Paket	100.00%	22 Paket	22 Paket	100.00%
01	2016	08		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60 Laporan	40 Laporan	40 Laporan	45 Laporan	112.50%	50 Laporan	50 Laporan	100.00%
01	2016	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	36 Laporan	40 Laporan	45 Laporan	112.50%	50 Laporan	50 Laporan	100.00%
01	2018			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang (CPJP) Urusan Pemerintahan Daerah	100 (%)	100%	100%	100%	100.00%	100 (%)	100 (%)	100.00%

01	2018	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4000 Laporan	2100 Laporan	2100 Laporan	2800 Laporan	133.33%	3500 Laporan	3500 Laporan	100.00%
01	2018	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100.00%	5 Laporan	5 Laporan	100.00%
01	2017		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pengadaan barang milik daerah (CPBMD) penunjang urusan pemerintahan daerah	4 Laporan	100%	100%	100%	100.00%	100 (%)	100 (%)	100.00%
01	2017	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	100 (%)	0 unit	0 Unit	0 Unit		1 unit	1 unit	

01	207	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100.00%	1 unit	1 unit	100.00%
01	207	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 unit	8 unit	8 unit	8 unit	100.00%	8 unit	8 unit	100.00%
01	207	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	0 unit	0 unit		0 unit	0 unit	
01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah (CPBMD) penunjang urusan pemerintahan daerah	100 (%)	100%	100%	100%	100.00%	100 (%)	100 (%)	100.00%
01	209	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25 Unit	24 Unit	24 unit	24 unit	100.00%	24 Unit	24 Unit	100.00%

			atau Kendaraan Dinas Jabatan	yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya								
01	2019	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	64 Unit	63 Unit	63 unit	63 unit	100.00%	63 Unit	63 Unit	100.00%
01	2019	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 Unit	16 Unit	16 Unit	16 Unit	100.00%	16 Unit	16 Unit	100.00%
01	2019	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	3 Unit	3 Unit	3 unit	3 unit	100.00%	3 Unit	3 Unit	100.00%
01	2019	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	12 Unit	12 Unit	12 Unit	12 Unit	100.00%	12 Unit	12 Unit	100.00%

					Dipelihara /Direhabilitasi								
					Program Pengelolaan Keuangan Daerah	91.43							
					1. Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah bidang anggaran	100.00	100%	100%	100%	100.00%	100,00%	100,00%	100.00%
					2. Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah bidang perbendaharaan	92.50	100%	100%	100%	100.00%	100,00%	100,00%	100.00%
					2. Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah bidang akuntansi	100.00	100%	100%	100%	100.00%	100%	100%	100.00%
02	201				Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Presentase Penganggaran sesuai ketentuan	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%

0 2	20 1	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100.00%	2 dokumen	2 dokumen	100.00%
0 2	20 1	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100.00%	2 dokumen	2 dokumen	100.00%
0 2	20 1	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	28 dokumen	28 dokumen	28 dokumen	28 dokumen	100.00%	28 dokumen	28 dokumen	100.00%
0 2	20 1	04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	28 dokumen	28 dokumen	28 dokumen	28 dokumen	100.00%	28 dokumen	28 dokumen	100.00%
0 2	20 1	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100.00%	2 dokumen	2 dokumen	100.00%

0 2	20 1	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100.00%	3 dokumen	3 dokumen	100.00%
0 2	20 2		Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase penatausahaan keuangan sesuai ketentuan	92.50	80%	80%	80%	100.00%	80%	80%	100.00%
0 2	20 1	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	28 dokumen	28 dokumen	28 dokumen	28 dokumen	100.00%	28 dokumen	28 dokumen	100.00%
0 2	20 1	06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	28 dokumen	28 dokumen	28 dokumen	28 dokumen	100.00%	28 dokumen	28 dokumen	100.00%
0 2	20 2	03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan	112 dokumen	112 dokumen	112 dokumen	112 dokumen	100.00%	112 dokumen	112 dokumen	100.00%

				Anggaran Kas dan SPD									
0 2	20 2	04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100.00%	12 dokumen	12 dokumen	100.00%	
0 2	20 2	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	16 dokumen	16 dokumen	16 dokumen	16 dokumen	100.00%	16 dokumen	16 dokumen	100.00%	
0 2	20 2	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan	2 dokumen	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100.00%	20 Laporan	20 Laporan	100.00%	

				Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)								
02	202	09		Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100.00%	12 Dokumen	12 Dokumen	100.00%

				Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait							
02	202	10		Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100.00%	1 dokumen	1 dokumen 100.00%
02	203			Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase LK OPD yang sesuai dengan ketentuan	100	100%	100%	100%	100.00%	100%	100% 100.00%

0 2	20 3	02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	102 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100.00%	103 dokumen	103 dokumen	100.00%
0 2	20 3	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100.00%	12 laporan	12 laporan	100.00%
0 2	20 3	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100.00%	2 dokumen	2 dokumen	100.00%

				Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungja waban Pelaksanaan APBD Kabupaten/K ota								
0 2	20 3	08		Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungja waban Pelaksanaan APBD	1 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%	1 Dokume n	1 Dokumen	100.00%
0 2	20 3	09		Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggara an Akuntansi Pemerintah Daerah	1 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%	1 dokumen	1 dokumen	100.00%
0 2	20 3	10		Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100.00%	1 dokumen	1 dokumen	100.00%

				Pemerintah Daerah	Pemerintah Daerah								
02	203	11		Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	103 orang	103 Orang	103 Orang	103 Orang	100.00%	103 Orang	103 Orang	100.00%
02	204			Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100	100%	100%	100%	100.00%	100%	100%	100.00%
02	204	09		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12 laporan	12 laporan	12 Laporan	12 Laporan	100.00%	12 laporan	12 laporan	100.00%
03				Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Cakupan Pengelolaan BMD	85.71	85,71%	85,71%	85.71%	100.00%	85,71%	85,71%	100.00%

03	201			Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Cakupan Pengelolaan BMD	74.68	68,34%	68,34%	68.34%	100.00%	68,34%	68,34%	100.00%
03	201	01		Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100.00%	2 dokumen	2 dokumen	100.00%
03	201	03		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	7 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	100.00%	7 dokumen	7 dokumen	100.00%
03	201	05		Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100.00%	1 laporan	1 laporan	100.00%
03	201	06		Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100.00%	1 laporan	1 laporan	100.00%
03	201	07		Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100.00%	1 laporan	1 laporan	100.00%
03	201	08		Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik	6 laporan	6 laporan	6 laporan	6 laporan	100.00%	6 laporan	6 laporan	100.00%

				Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah								
03	201	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	7 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	100.00%	7 Dokumen	7 Dokumen	100.00%
03	201	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	dokumen	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100.00%	4 Laporan	4 Laporan	100.00%
03	201	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	14 laporan	14 laporan	14 laporan	14 laporan	100.00%	14 laporan	14 laporan	100.00%

03	201	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	112 orang	112 Orang	112 Orang	112 Orang	100.00%	112 Orang	112 Orang	100.00%
04			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan PAD	115.47	100%	104,19%	102.09%	97.98%	110.06%	110.06%	100.00%
04	201		Kegiatan Pengelolaan pendapatan daerah	Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah	100.00	126.82%	100%	113.41%	113.41%	100%	100%	100.00%
04	201	01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%
04	201	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan	1 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	100.00%	4 laporan	4 laporan	100.00%

					n Kebijakan Pajak Daerah								
04	201	06		Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	17 laporan	17 Laporan	17 Laporan	17 Laporan	100.00%	17 Laporan	17 Laporan	100.00%
04	201	07		Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	800 Objek Pajak	800 Obyek Pajak	800 Obyek Pajak	800 Obyek Pajak	100.00%	800 Obyek Pajak	800 Obyek Pajak	100.00%
04	201	08		Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	36500 dokumen	36000 Dokumen	36000 Dokumen	36000 Dokumen	100.00%	36000 Dokumen	36000 Dokumen	100.00%
04	201	10		Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	12 dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100.00%	12 Dokumen	12 Dokumen	100.00%

04	201	11		Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	10 dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	100.00%	10 Dokumen	10 Dokumen	100.00%
04	201	13		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100.00%	12 dokumen	12 dokumen	100.00%
04	201	14		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	100.00%	4 laporan	4 laporan	100.00%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi Pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Kinerja pelayanan yang disusun mengandung maksud agar setiap perencanaan yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang dapat lebih terarah yang secara administratif dapat memenuhi persyaratan yang dapat dipertanggungjawabkan serta dengan skala prioritas yang disesuaikan dengan jumlah pendanaan yang telah disesuaikan. Dengan demikian perencanaan yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang akan lebih bermanfaat dan tepat sasaran sehingga yang menjadi tujuan setiap kegiatan dapat tercapai sesuai harapan.

Capaian Kinerja pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2023 berdasarkan indikator kinerja pada RPJMD Kota Magelang adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 3
Sasaran Strategi
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023 (TW II)	%
Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah	Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Barang Milik Daerah	91,09	90,13	98,95
Meningkatnya Kemandirian Daerah	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	34,61	41,16	118,93
Meningkatnya pelayanan Perangkat	Persentase Pelayanan Internal Perangkat	100	100	100

Daerah yang berkualitas	Daerah yang Berkualitas			
Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	91,43	75,16	82,20
Meningkatnya kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	90,76	105,10	115,81
Meningkatnya Pendapatan daerah	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	25,25	30,12	119,29

Apabila dilihat dari tingkat kemajuan yang dicapai dari masing-masing indikator sampai dengan triwulan II tahun 2023 untuk indikator pencapaian sasaran strategis diperoleh 1 (satu) indikator dengan prosentase atau tingkat capaian sama dengan 100%, dan 3 (tiga) indikator yang tingkat kemajuannya lebih dari 100%. Maka bisa disimpulkan bahwa capaian indikator sasaran BPKAD Kota Magelang telah baik.

Pencapaian kinerja pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai organisasi perangkat daerah dalam urusan Keuangan, disajikan dalam tabel berikut ini

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kota Magelang

No	Indikator	SPM/ stan dar nasio nal	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (n-2)	Tahun 2023 (n-1)	Tahun 2024 (n)	Tahun 2025 (n+1)	Tahun 2022 (n-2)	Tahun 2023 (n-1) TWII	Tahun 2024 (n)	Tahun 2025 (n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Indikator Renstra 2021-2026												
	Persentase Capaian Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan Barang Milik Daerah	-	-	89.77	91.09	92.03	93.69	102,45	90,13	92.03	93.69	
	Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-	89.76	91.43	91.43	93.10	100	75,16	91.43	93.10	
	Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah bidang anggaran	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00	100	45,00	100.00	100.00	
	Persentase capaian pengelolaan keuangan	-	-	100.00	100.00	92.50	100.00	100	80,47	92.50	100.00	

	daerah bidang perbendaharaan											
	Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah bidang akuntansi	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00	100	100,00	100.00	100.00	
	Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-	89.77	90.76	92.64	94.29	104,91	105,10	92.64	94.29	
	Cakupan Pengelolaan BMD	-	-	85.71	85.71	85.71	89.29	100	100	85.71	89.29	
	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	-	-	36.16	34.61	35.64	36.69	54,03	41,16	35.64	36.69	
	Rasio PAD terhadap pendapatan daerah	-	-	26,05	25,25	25,81	26,37	38,37	30,12	25,81	26,37	
	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah			100.19	110.00	115,47	121,15	176,72	62,33	115,47	121,15	

2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pada pelaksanaan tugas dan fungsinya, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang menghadapi isu penting sebagai berikut:

1. Masih kurang tergalinya potensi pajak daerah;
2. Belum optimalnya pemanfaatan aset sebagai potensi PAD;
3. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah perlu ditingkatkan.

2.3.1 Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Bedasarkan Peraturan Walikota Nomor 86 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan pelayanan sebagai berikut:

Tugas :

1. Merumuskan dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
2. Mengoordinasikan dan mengarahkan pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
3. Mengoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan program dan kegiatan pada Sekretariat dan Bidang-Bidang di bawahnya;
4. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan Daerah dan pengelolaan barang milik Daerah berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
5. Menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
6. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD);
7. Melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang telah diatur dalam Perda;
8. Mengoordinasikan dan bertanggung jawab atas proses pengadaan barang/ jasa di lingkup Badan Pengelola Keuangan

dan Aset Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

9. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam pengelolaan keuangan Daerah dan pengelolaan barang milik Daerah;
10. Mengendalikan pengelolaan keuangan, kepegawaian dan barang milik daerah di lingkup tugasnya;
11. Membina, mengarahkan, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
12. Memberikan saran/ pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan;
13. Melaksanakan tertib administrasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; dan
14. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Fungsi :

1. Perumusan rencana dan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan pengelolaan Barang Milik Daerah
2. Pengkoordinasian dan pengarahan dalam penyusunan program, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
3. Pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku .
4. Pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan operasional di lingkup tugasnya.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di atas maka kinerja pelayanan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang difokuskan pada pelayanan urusan keuangan yang dapat meningkatkan kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah serta meningkatkan kemandirian keuangan daerah.

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Perangkat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Beberapa permasalahan dan hambatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi antara lain:

- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dimana berdasarkan ketentuan ini maka Pemerintah Daerah secara bertahap harus melaksanakan penyesuaian dalam pengelolaan keuangan daerah. Penyesuaian ini diwujudkan dengan penyusunan produk hukum daerah sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang dimaksud serta pengambilan kebijakan-kebijakan khususnya dalam pengelolaan keuangan baik dari sisi pendapatan maupun belanja yang tidak bertentangan dengan ketentuan ini.
- b. Amanat dari PP Nomor 12 Tahun 2019 agar daerah memenuhi kewajiban-kewajiban belanja wajib yang besarnya ditentukan peraturan perundangan yang berlaku. Ketidakpatuhan akan ketentuan ini berakibat pada penundaan transfer atau pemotongan penyaluran Dana Transfer Umum. Oleh karena itu perlu kecermatan dalam penganggaran dan pengambilan kebijakan belanja daerah

2.3.3 Dampaknya terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap Capaian Program Nasional

Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Magelang Tahun 2021-2026, ditetapkan visi pembangunan Kota Magelang yaitu **“Magelang Maju, Sehat, dan Bahagia”** Dalam rangka pencapaian visi secara efektif dan efisien disusunlah misi Kota Magelang, yaitu:

- MISI I Mewujudkan Masyarakat Yang Relijius, Berbudaya, Beradab, Toleran, Berlandaskan Imtaq.
- MISI 2 Memenuhi Kebutuhan Pelayanan Dasar Masyarakat Untuk Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia.

- MISI 3 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Inovatif.
- MISI 4 Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Dengan Peningkatan Peran UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan.
- MISI 5 Mewujudkan Kota Modern Yang Berdaya Saing Dengan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Dan Infrastruktur.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang, sebagai garda depan Urusan, menyelenggarakan urusan Keuangan memberikan kemudahan dalam rangka mendukung misi ke-3 Kota Magelang yaitu: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Inovatif

2.3.4 Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan

Dalam meningkatkan pelayanan urusan/bidang , Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang terdapat tantangan dan peluang. Adapun tantangan yang dihadapi antara lain:

- a. Belum terpenuhinya kualitas penganggaran sesuai dengan ketentuan;
- b. Belum efektifnya proses penatausahaan keuangan;
- c. Belum terpenuhinya tertib administrasi pencatatan keuangan yang diatur dalam kebijakan akuntansi untuk memperoleh laporan keuangan yang memenuhi prinsip transparansi dan akuntabel;
- d. Kurang optimalnya penerimaan PAD;
- e. Penyajian usulan RKBMD dari OPD kurang tepat waktu;
- f. Pemanfaatan dan pengamanan BMD yang belum optimal;
- g. Kompetensi SDM Pengelola Barang yang masih kurang.

Sedangkan peluang yang ada, antara lain:

- a. Sarana dan prasarana kerja yang cukup memadai;
- b. Komitmen semua pegawai untuk mencapai visi dan misi Kota Magelang
- c. Ketersediaan SDM yang lebih dapat dioptimalkan

- d. Adanya Perda Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah yang bisa dijadikan pedoman dalam pengelolaan keuangan di Pemerintah Kota Magelang.

2.3.5 Rekomendasi Strategis dalam Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2024

Identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban sebagai organisasi yang berperan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Untuk menghasilkan capaian kinerja yang sesuai dengan harapan, maka strategi pemecahan masalah yang dapat dilakukan antara lain:

- a. Melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah pada tahun 2024;
- b. Menetapkan kerangka pendanaan yang bisa menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan perencanaan anggaran berbasis kinerja dan berorientasi pada konsep money follow programme priority;
- c. Kebijakan belanja daerah juga perlu dimaksimalkan untuk mencapai visi, misi, sasaran dan tujuan pembangunan daerah yang difokuskan pada program dan kegiatan yang didanai dari penerimaan daerah.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Renja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024. Rancangan awal Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2024 dibuat berdasarkan hasil analisis kebutuhan. Urusan wajib Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari 0 (nol) program dan 0 (nol) kegiatan, Urusan Pilihan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari 3 program dan 7 kegiatan. Serta 1 program pendukung dan 6 kegiatan untuk kelancaran pelayanan administrasi perkantoran. Secara lebih jelas, rumusan

program dan kegiatan maupun kebutuhan dana telah sesuai dengan adanya rancangan awal RKPD yang disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2. 4.1
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024
Kota Magelang

Nama Perangkat Daerah: BPKAD Kota Magelang

lembar... dari...

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Magelang	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 Dokumen	6,915,000.00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Magelang	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	6 Dokumen	8.697.700,00	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Magelang	Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2,854,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Magelang	Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.855.000,00	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan	1 Dokumen	2,689,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil	1 Dokumen	2.688.800,00	

			Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Magelang	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3,317,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Magelang	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3.316.900,00	
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3,470,000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.471.000,00	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian	Kota Magelang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	30 Laporan	62,276,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian	Kota Magelang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	30 Laporan	12.637.000,00	

	Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Magelang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44 Orang/bulan	8,226,805,233	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Magelang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	9.318.029.157,00	
8	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24 Dokumen	13,292,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24 Dokumen	13.291.900,00	
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Kota Magelang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan	18 Laporan	50,108,441	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Kota Magelang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/	18 Laporan	53.400.300,00	

	Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tr iwulanan /Semester an SKPD			Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tr iwulanan /Semesteran SKPD			
1 0	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Magela ng	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaia n	12 Dokume n	1,999,800. 00	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Magela ng	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokume n	1.994.300, 00	
1 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	Kota Magela ng	Jumlah paket komponen instalasi listrik/pene rangan bangunan kantor yang disediakan	20 Paket	5,986,400. 00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	Kota Magela ng	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penera ngan bangunan kantor yang disediakan	20 Paket	5.979.700, 00	
1 2	Penyediaan Peralatan dan	Kota Magela ng	Jumlah paket peralatan			Penyediaan Peralatan dan	Kota Magela ng	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan			

	Perlengkapan Kantor		dan perlengkapan kantor yang disediakan			Perlengkapan Kantor		kantor yang disediakan			
13	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Magelang	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan		15,463,500	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Magelang	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	80 Paket	22.806.600,00	
14	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Magelang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	13 Paket	10,378,400	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Magelang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	13 Paket	9.567.000,00	
15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	3 Dokumen	5,400,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	3 Dokumen	5.400.000,00	
16	Penyediaan Bahan/Material	Kota Magelang	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	31 Paket	6,943,600	Penyediaan Bahan/Material	Kota Magelang	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	31 Paket	6.927.600,00	

17	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kota Magelang	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	14 Laporan	18,468,000	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kota Magelang	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	14 Laporan	14.820.000,00	
18	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Magelang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	76,392,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Magelang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	87.860.000,00	
19	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3600 Laporan	74,270,780	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Magelang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3600 Laporan	74.691.560,00	
20	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Magelang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	273,109,084	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Magelang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	315.849.084,00	
21	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Magelang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	12 Laporan	110,281,922	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Magelang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	12 Laporan	100.094.550,00	

			Umum Kantor yang disediakan					Umum Kantor yang disediakan			
2 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Magelang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	24 Unit	211,517,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Magelang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	24 Unit	242.087.600,00	
2 3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Magelang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50 Unit	343,609,521	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Magelang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50 Unit	319.852.500,00	
2 4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Magelang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	96 Unit	69,988,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Magelang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	96 Unit	69.905.000,00	

			yang dipelihara								
25	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Kota Magelang	Jumlah Aset Tak Berwujud yang dipelihara	4 Unit	193,375,000	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Kota Magelang	Jumlah Aset Tak Berwujud yang dipelihara	3 Unit	122.700.000,00	
26	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Magelang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	9 Unit	682,460,760	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Magelang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	9 Unit	638.826.660,00	
27	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kota Magelang	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	57,683,000	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kota Magelang	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	64.127.900,00	
28	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	27,465,000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	40.337.800,00	
29	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Kota Magelang	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	28 Dokumen	42,445,000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Kota Magelang	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	28 Dokumen	40.923.300,00	

30	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Kota Magelang	Jumlah Perubahan RKASKPD yang Diverifikasi	28 Dokumen	31,577,000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Kota Magelang	Jumlah Perubahan RKASKPD yang Diverifikasi	28 Dokumen	21.728.700,00	
31	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Kota Magelang	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	28 Dokumen	9,601,000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Kota Magelang	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	28 Dokumen	9.730.800,00	
32	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Kota Magelang	Jumlah Perubahan DPASKPD yang Diverifikasi	28 Dokumen	7,342,800	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Kota Magelang	Jumlah Perubahan DPASKPD yang Diverifikasi	28 Dokumen	9.737.800,00	
33	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kota Magelang	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	126,632,160	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kota Magelang	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	201.357.760,00	
34	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan	Kota Magelang	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala	2 Dokumen	92,699,000	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan	Kota Magelang	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala	2 Dokumen	187.816.100,00	

	Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD		Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD			Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD		Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD			
35	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen	70,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen	77.406.200,00	
						Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Magelang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	1000 Orang	361.014.800,00	
36	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	112 Dokumen	9,185,000	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	28 Dokumen	5.510.000,00	

37	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	12 Dokumen	11,117,000	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	112 Dokumen	9.982.900,00	
38	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	98 Dokumen	31,829,000	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	16 Dokumen	31.829.000,00	
							Kota Magelang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring,	90 Dokumen	31.829.000,00	

								dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya			
3 9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Kota Magelang	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka	20 Laporan	56,214,800	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Kota Magelang	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan	20 Laporan	55.791.300,00	

			Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)					Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)			
40	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D	12 Dokumen	106,940,000	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D	5 Dokumen	5.915.000,00	

			dengan Instansi Terkait					dengan Instansi Terkait			
4 1	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Kota Magelang	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	21,338,000	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Kota Magelang	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	12 Dokumen	83.633.000,00	
4 2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, PendapatanLO dan Beban	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan	102 Dokumen	32,868,960	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, PendapatanLO dan Beban	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan,	102 Dokumen	41.108.100,00	

			Pendapatan LO, dan Beban					Pendapatan LO, dan Beban			
43	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Magelang	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	336 Laporan	28,480,560	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Magelang	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	336 Laporan	75.276.700,00	
44	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang	Kota Magelang	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	2 Dokumen	81,160,900	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang	Kota Magelang	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	2 Dokumen	57.545.800,00	

	Penjabaran Pertanggungja waban Pelaksanaa n APBD Kabupaten/Ko ta		Pertanggun gjawaban Pelaksanaa n APBD Kabupaten/ Kota			Penjabaran Pertanggungja waban Pelaksanaa n APBD Kabupaten/Ko ta		Pertanggungj awaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/K ota			
4 5	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungja waban Pelaksanaa n APBD	Kota Magela ng	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggun gjawaban Pelaksanaa n APBD		12,225,60 0	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungja waban Pelaksanaa n APBD	Kota Magela ng	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungj awaban Pelaksanaa n APBD			
4 6	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggara an Akuntansi Pemerintah Daerah	Kota Magela ng	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelengga raan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokume n	34,070,26 0	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggara an Akuntansi Pemerintah Daerah	Kota Magela ng	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggar aan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokume n	31.100.00 0,00	
4 7	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Kota Magela ng	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan			Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Kota Magela ng	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan			Hapus Sub Kegiat an

	Pemerintah Daerah		Keuangan Pemerintah Daerah			Pemerintah Daerah		Keuangan Pemerintah Daerah			
48	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Magelang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	204 Orang	74,462,860	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Magelang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	204 Orang	82.217.360,00	
49	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kota Magelang	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12 Laporan	5,000,000,000.00	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kota Magelang	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12 Laporan	5.000.000.000,00	
50	Penyusunan Standar Harga		Jumlah Standar Harga yang Disusun Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Dokumen	20,481,900	Penyusunan Standar Harga	Kota Magelang	Jumlah Standar Harga yang Disusun Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Dokumen	44.009.200,00	

51	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kota Magelang	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	45,799,900	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kota Magelang	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah			
52	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kota Magelang	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	3 Dokumen	20,539,700	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kota Magelang	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	7 Dokumen	19.034.900,00	
53	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kota Magelang	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	195,053,642	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kota Magelang	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	209.277.900,00	
54	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Kota Magelang	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	56,495,500	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Kota Magelang	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	56.495.400,00	
55	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kota Magelang	Jumlah Laporan Hasil	12 Laporan	352,257,700	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kota Magelang	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan	12 Laporan	328.062.600,00	

			Pengamanan Barang Milik Daerah					Barang Milik Daerah			
56	Penilaian Barang Milik Daerah	Kota Magelang	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	6 Laporan	245,791,700	Penilaian Barang Milik Daerah	Kota Magelang	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	5 Laporan	242.951.900,00	
57	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang	7 Dokumen	80,207,466	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	4 Dokumen	75.195.866,00	

			Milik Daerah								
58	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kota Magelang	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	14 Laporan	81,772,921	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kota Magelang	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	14 Laporan	95.694.000,00	
59	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Magelang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	200 Orang	35,609,900	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Magelang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	200 Orang	35.609.600,00	
60	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dokumen	1,448,653,562	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dokumen	1.581.585.600,00	
61	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kota Magelang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan	4 Laporan	18,478,000	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kota Magelang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan	4 Laporan	17.640.300,00	

			san Kebijakan Pajak Daerah					an Kebijakan Pajak Daerah			
6 2	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kota Magela ng	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaa n, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	17 Laporan	68,985,00 0	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kota Magela ng	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan , dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	17 Laporan	68.984.70 0,00	
6 3	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Kota Magela ng	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaika n NJOP nya	1200 Obyek Pajak	24,180,00 0	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Kota Magela ng	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	1200 Obyek Pajak	24.179.70 0,00	
6 4	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Kota Magela ng	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	36000 Dokume n	66,219,00 0	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Kota Magela ng	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	36000 Dokume n	67.417.00 0,00	

65	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Kota Magelang	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	12 Dokumen	7,879,000	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Kota Magelang	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	12 Dokumen	7.878.900,00	
66	Penagihan Pajak Daerah	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	10 Dokumen	313,596,000	Penagihan Pajak Daerah	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	10 Dokumen	387.515.900,00	
67	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Dokumen	116,877,000	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Dokumen	116.355.300,00	
68	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah	Kota Magelang	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan	4 Laporan	92,185,000	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah	Kota Magelang	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan	4 Laporan	80.213.600,00	

	dan Retribusi Daerah		Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah			dan Retribusi Daerah		Pengelolaan Retribusi Daerah			
69	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Kota Magelang	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1 Laporan	39,217,000	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Kota Magelang	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1 Laporan	36.256.800,00	
				TOTAL	19,766,988,232,00		Kota Magelang		TOTAL	21.512.142.111,00	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang sebagai unsur penunjang pembangunan daerah melakukan penjaringan aspirasi masyarakat yaitu pelaksanaan Musrenbang secara berjenjang melalui Musrenbang Desa/Kelurahan, sampai Musrenbang Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, Regional dan Nasional tetap melakukan upaya dalam rangka pelaksanaan pentahapan proses perencanaan pembangunan. Di dalam pelaksanaan Musrenbang tersebut dilakukan pengkajian usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat, LSM, dan asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi, maupun dari SKPD Kabupaten yang langsung ditujukan kepada SKPD serta berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dan berdasarkan hasil pengamatan pelaksanaan Musrenbang kecamatan dengan tetap memperhatikan agenda prioritas pembangunan tahun 2024 yang tertuang di dalam RPJMD 2021-2026. Usulan dari pemangku kepentingan tersebut kemudian menjadi bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Usulan Program kegiatan masyarakat melalui Musrenbang mulai dari Musrenbang tingkat Kecamatan untuk tahun 2024 yang sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang diakomodir dalam program dan kegiatan Rencana Kerja, sebagai berikut: (tidak ada)

Tabel 2. 5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2024 Kota Magelang

Nama Perangkat Daerah : BPKAD Kota Magelang

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
-	-	-	-	-	-

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

RPJMN 2020-2024 merupakan periode IV dari Pembangunan Jangka Panjang Nasional untuk mewujudkan visi **“Indonesia 2045 Berdaulat, Adil, Makmur”**. Arah kebijakan RPJMN dalam periode ini merupakan tahapan dalam mewujudkan visi pembangunan jangka panjang yaitu mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur, sesuai dengan tema RPJMN IV **“Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, makmur, melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung SDM berkualitas dan berdaya saing”**. Dalam rancangan teknokratik, RPJMN 2020-2024 dijabarkan dalam 7 agenda pembangunan yaitu (1) memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; (2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; (3) meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; (4) revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; (5) memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; (6) membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; (7) memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

RPJMN 2020-2024 menargetkan Indikator pada setiap perangkat daerah. Target RPJMN ini menghadapi tantangan global yang belum kondusif, merupakan dampak dari bencana virus corona (Covid-19) pada awal Tahun 2020.

Dalam Penyusunan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2024 mengacu pada kebijakan Nasional, Serta disinkronkan dengan arah pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk menjaga sinergitas pelaksanaan pembangunan dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Berpedoman pada hasil penyalarsan/sinkronisasi prioritas pembangunan Pusat dan Provinsi

Jawa Tengah serta memperhatikan saran dan masukan dari peserta Forum Konsultasi Publik, maka prioritas pembangunan yang diprioritaskan sebagaimana digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 3. 1
Korelasi Prioritas Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kota Magelang

No.	Prioritas Nasional	Provinsi Jawa Tengah	Kota Magelang
1	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing	Penguatan layanan dasar dan tata kelola pemerintahan
2	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	Penguatan layanan dasar dan tata kelola pemerintahan
3	Memperkuat Stabilitas Polhukhankamm dan Transformasi Pelayanan Publik	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	Penguatan layanan dasar dan tata kelola pemerintahan

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang

Dalam Mendukung visi dan misi Walikota Magelang, tujuan dan sasaran Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2024 mengacu kepada misi yang terkait dengan urusan Pemerintahan masuk pada misi ke-3 yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Inovatif. Sedangkan, Tujuan dan sasaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang berdasarkan Misi ke-3 Walikota dan Wakil Walikota Magelang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3. 2
Tujuan dan Sasaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Formula Hitung	Target pada tahun 2024
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah		Persentase Capaian Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan Barang Milik Daerah	1. A = Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah 2. B = Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah $(A+B)/2 \times 100\%$	92.03%

2		Meningkatnya pelayanan Perangkat Daerah yang berkualitas	Persentase Pelayanan Internal Perangkat Daerah yang berkualitas	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Kategori</th> <th>Bobot</th> <th>Sub-Kategori</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Perencanaan Kinerja</td> <td>20%</td> <td>A. Rencana Strategis (10%), Indikator Kinerja Utama (5%), Kualitas Rencana (5%) dan Implementasi Rencana (5%) B. Perencanaan Kinerja Tahunan (20%) meliputi: Perencanaan RKAT (4%), Kualitas RKAT (10%) dan Implementasi RKAT (6%).</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pengukuran Kinerja</td> <td>25%</td> <td>A. Pemantauan pelaksanaan (5%) B. Kualitas Pengukuran (12,5%) C. Implementasi pengukuran (7,5%)</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pelaporan Kinerja</td> <td>15%</td> <td>A. Pemantauan pelaporan (5%) B. Kualitas pelaporan (7,5%) C. Pemertan pelaporan (2,5%)</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Evaluasi Kinerja</td> <td>10%</td> <td>A. Pemantauan evaluasi (5%) B. Kualitas evaluasi (4%) C. Pemertan hasil evaluasi (1%)</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Capaian Kinerja</td> <td>25%</td> <td>A. Kinerja yang diapresiasi (tercapai) (8%) B. Kinerja yang diapresiasi sebagian (10%) C. Kinerja tidak tercapai (berdasarkan) (6%)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total</td> <td>100%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No	Kategori	Bobot	Sub-Kategori	1	Perencanaan Kinerja	20%	A. Rencana Strategis (10%), Indikator Kinerja Utama (5%), Kualitas Rencana (5%) dan Implementasi Rencana (5%) B. Perencanaan Kinerja Tahunan (20%) meliputi: Perencanaan RKAT (4%), Kualitas RKAT (10%) dan Implementasi RKAT (6%).	2	Pengukuran Kinerja	25%	A. Pemantauan pelaksanaan (5%) B. Kualitas Pengukuran (12,5%) C. Implementasi pengukuran (7,5%)	3	Pelaporan Kinerja	15%	A. Pemantauan pelaporan (5%) B. Kualitas pelaporan (7,5%) C. Pemertan pelaporan (2,5%)	4	Evaluasi Kinerja	10%	A. Pemantauan evaluasi (5%) B. Kualitas evaluasi (4%) C. Pemertan hasil evaluasi (1%)	5	Capaian Kinerja	25%	A. Kinerja yang diapresiasi (tercapai) (8%) B. Kinerja yang diapresiasi sebagian (10%) C. Kinerja tidak tercapai (berdasarkan) (6%)	Total		100%		100%
No	Kategori	Bobot	Sub-Kategori																														
1	Perencanaan Kinerja	20%	A. Rencana Strategis (10%), Indikator Kinerja Utama (5%), Kualitas Rencana (5%) dan Implementasi Rencana (5%) B. Perencanaan Kinerja Tahunan (20%) meliputi: Perencanaan RKAT (4%), Kualitas RKAT (10%) dan Implementasi RKAT (6%).																														
2	Pengukuran Kinerja	25%	A. Pemantauan pelaksanaan (5%) B. Kualitas Pengukuran (12,5%) C. Implementasi pengukuran (7,5%)																														
3	Pelaporan Kinerja	15%	A. Pemantauan pelaporan (5%) B. Kualitas pelaporan (7,5%) C. Pemertan pelaporan (2,5%)																														
4	Evaluasi Kinerja	10%	A. Pemantauan evaluasi (5%) B. Kualitas evaluasi (4%) C. Pemertan hasil evaluasi (1%)																														
5	Capaian Kinerja	25%	A. Kinerja yang diapresiasi (tercapai) (8%) B. Kinerja yang diapresiasi sebagian (10%) C. Kinerja tidak tercapai (berdasarkan) (6%)																														
Total		100%																															
3		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	<p>A. Persentase Dokumen Penganggaran Daerah yang tepat waktu</p> <p>B. Persentase pencairan belanja sesuai pengajuan</p> <p>C. Pelaporan Keuangan sesuai SAP</p> <p>DO = $(A+B+C)/3 \times 100\%$</p>	97.50%																												
4		Meningkatnya kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	<p>A. rasio jumlah pemanfaatan BMD terhadap potensi pemanfaatan BMD</p> <p>B. Rasio pensertifikatan tanah</p> <p>C. Persentase pengumpulan usulan</p>	92.64%																												

				RKBMD secara benar dan tepat waktu D. Persentase pengumpulan Laporan BMD yang benar dan tepat waktu DO : $(A+B+C+D)/4 \times 100\%$	
5	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah		Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	A. Anggaran PAD B. Anggaran Transfer Pusat+Provinsi+Pinjaman $(A/B) \times 100\%$	35.64%
6		Meningkatnya pendapatan daerah	Rasio PAD terhadap pendapatan daerah	A. PAD tahun(t) B. Pendapatan Daerah tahun(t) $(A/B) \times 100\%$	25.81%

3.3 Program dan Kegiatan

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang dalam mengimplmetasikan tugas dan fungsinya sebagai pelayan publik menyusun program dan kegiatan untuk tahun 2024 serta merupakan perwujudan dari upaya untuk mendukung visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Magelang. Program dan kegiatan yang dilaksanakan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang pada tahun 2023 pada awalnya disusun sebanyak 7 program. Namun dengan terbitnya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri 050-3708

Tahun 2020, dilakukan beberapa penyesuaian menjadi 4 program, yaitu (1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, (2) Program Pengelolaan Keuangan Daerah, (3) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan (4) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3. 3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kota Magelang
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah				21.512.142.111,00				24.291.270.618,00
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				21.512.142.111,00				24.291.270.618,00
5	0				KEUANGAN				21.512.142.111,00				24.291.270.618,00
5	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				11.494.504.625,00				11.383.579.746,00
5	0	0	2.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				33.666.400,00				35.060.000,00
5	0	0	2.	00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan (TPK) Perencanaan penganggaran dan	- Kota Magelang, Semua Kecamatan	2 Dokumen	8.697.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	7.606.000,00

						evaluasi kinerja, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan	n, Semua Kel/Desa						
5	0 2	0 1	2. 0 1	00 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan (TPK) Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan	- Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	2.855.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	3.139.000,0 0
5	0 2	0 1	2. 0 1	00 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan (TPK) Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola	- Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	2.688.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	2.957.000,0 0

						penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan							
5	0 2	0 1	2. 0 1	00 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan (TPK) Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan	- Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	3.316.900,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	3.648.000,0 0
5	0 2	0 1	2. 0 1	00 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan (TPK) Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan	- Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	3.471.000,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	3.816.000,0 0
5	0 2	0 1	2. 0 1	00 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan (TPK) Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja, administrasi keuangan, administrasi	- Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Laporan	12.637.000,0 0	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		30 Laporan	13.894.000, 00

						kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan							
5	0 2	0 1	2. 0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				9.412.026.55 7,00				8.894.040.3 62,00
5	0 2	0 1	2. 0 2	00 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan (TPK) Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan	- Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40 Orang/bulan	9.345.334.35 7,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		40 Orang/bulan	8.811.446.8 62,00
5	0 2	0 1	2. 0 2	00 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan (TPK) Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD	- Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24 Dokumen	13.291.900,0 0	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		24 Dokumen	14.621.000, 00

						dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan							
5	0 2	0 1	2. 0 2	00 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan (TPK) Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan	- Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18 Laporan	53.400.300,0 0	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		18 Laporan	67.972.500, 00
5	0 2	0 1	2. 0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				1.994.300,00				2.199.700,0 0
5	0 2	0 1	2. 0 5	00 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan (TPK) Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan	- Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	1.994.300,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		12 Dokumen	2.199.700,0 0

5	0 2	0 1	2. 0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah				153.360.900, 00				212.270.500 ,00
5	0 2	0 1	2. 0 6	00 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan (TPK) Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan	- Kota Magelang, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	20 Paket	5.979.700,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		20 Paket	6.585.000,0 0
5	0 2	0 1	2. 0 6	00 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan (TPK) Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan	- Kota Magelang, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	80 Paket	22.806.600,0 0	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		80 Paket	22.807.500, 00
5	0 2	0 1	2. 0 6	00 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan (TPK) Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja, administrasi keuangan,	- Kota Magelang, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	13 Paket	9.567.000,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		13 Paket	10.524.000, 00

						administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan							
5	0 2	0 1	2. 0 6	00 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan (TPK) Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan	- Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	5.400.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Dokumen	5.940.000,00
5	0 2	0 1	2. 0 6	00 07	Penyediaan Bahan/Material	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan (TPK) Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan	- Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31 Paket	6.927.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		31 Paket	7.638.000,00

5	0 2	0 1	2. 0 6	00 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan (TPK) Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan	- Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14 Laporan	14.820.000,0 0	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		14 Laporan	16.632.000, 00
5	0 2	0 1	2. 0 6	00 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan (TPK) Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan	- Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36 Laporan	87.860.000,0 0	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		36 Laporan	142.144.000 ,00
5	0 2	0 1	2. 0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				36.754.714,0 0				40.431.270, 00
5	0 2	0 1	2. 0 7	00 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan (TPK) Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja, administrasi keuangan,	- Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Unit	36.754.714,0 0	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		5 Unit	40.431.270, 00

						administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan							
5	0 2	0 1	2. 0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			490.635.194, 00				564.924.340 ,00	
5	0 2	0 1	2. 0 8	00 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan (TPK) Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan	- Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3600 Laporan	74.691.560,0 0	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		3600 Laporan	85.366.534, 00
5	0 2	0 1	2. 0 8	00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan (TPK) Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta	- Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	315.849.084, 00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	347.433.000 ,00

						pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan							
5	0 2	0 1	2. 0 8	00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan (TPK) Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan	- Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	100.094.550,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	132.124.806,00
5	0 2	0 1	2. 0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.393.371.760,00				1.634.653.574,00
5	0 2	0 1	2. 0 9	00 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan (TPK) Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan	- Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24 Unit	242.087.600,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		24 Unit	266.302.000,00

5	0 2	0 1	2. 0 9	00 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan (TPK) Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan	- Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Unit	319.852.500, 00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		50 Unit	356.624.162 ,00
5	0 2	0 1	2. 0 9	00 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan (TPK) Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan	- Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	96 Unit	69.905.000,0 0	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		96 Unit	76.895.000, 00
5	0 2	0 1	2. 0 9	00 08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan (TPK) Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa	- Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Unit	122.700.000, 00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		3 Unit	168.712.500 ,00

						penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan							
5	0 2	0 1	2. 0 9	00 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan (TPK) Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan	- Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9 Unit	638.826.660, 00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		9 Unit	766.119.912 ,00
5	0 2	0 2			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				6.523.278.32 0,00				8.671.045.9 05,00
5	0 2	0 2	2. 0 1		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah				1.014.181.16 0,00				1.097.567.3 56,00
5	0 2	0 2	2. 0 1	00 01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	1. Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah bidang anggaran	- Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	64.127.900,0 0	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	70.540.800, 00
5	0 2	0 2	2. 0 1	00 02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1. Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah bidang anggaran	- Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	40.337.800,0 0	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	44.371.800, 00

5	0 2	0 2	2. 0 1	00 03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	1. Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah bidang anggaran	- Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28 Dokumen	40.923.300,0 0	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		28 Dokumen	45.023.330, 00
5	0 2	0 2	2. 0 1	00 04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	1. Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah bidang anggaran	- Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28 Dokumen	21.728.700,0 0	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		28 Dokumen	23.902.340, 00
5	0 2	0 2	2. 0 1	00 05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	1. Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah bidang anggaran	- Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28 Dokumen	9.730.800,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		28 Dokumen	10.712.900, 00
5	0 2	0 2	2. 0 1	00 06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	1. Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah bidang anggaran	- Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28 Dokumen	9.737.800,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		28 Dokumen	10.712.900, 00
5	0 2	0 2	2. 0 1	00 07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1. Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah bidang anggaran	- Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	201.357.760, 00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	221.493.536, 00
5	0 2	0 2	2. 0 1	00 08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	1. Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah bidang anggaran	- Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	187.816.100, 00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	206.597.930, 00
5	0 2	0 2	2. 0 1	00 09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1. Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah bidang anggaran	- Kota Magelang, Semua Kecamatan	1 Dokumen	77.406.200,0 0	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	85.146.820, 00

							n, Semua Kel/Desa							
5	0 2	0 2	2. 0 1	00 13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	1. Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah bidang anggaran	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1000 Orang	361.014.800,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		1000 Orang	379.065.000,00	
5	0 2	0 2	2. 0 2		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah				221.849.200,00				244.150.500,00	
5	0 2	0 2	2. 0 2	00 01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	2. Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah bidang perbendaharaan	- Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28 Dokumen	5.510.000,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		28 Dokumen	6.061.000,00	
5	0 2	0 2	2. 0 2	00 03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	2. Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah bidang perbendaharaan	- Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	112 Dokumen	9.982.900,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		112 Dokumen	11.000.000,00	
5	0 2	0 2	2. 0 2	00 04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	2. Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah bidang perbendaharaan	- Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	11.117.000,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		12 Dokumen	12.228.700,00	
5	0 2	0 2	2. 0 2	00 05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	2. Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah bidang perbendaharaan	- Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16 Dokumen	31.829.000,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		16 Dokumen	35.011.900,00	

						2. Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah bidang perbendaharaan	- Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90 Dokumen	31.829.000,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		90 Dokumen	35.011.900,00
5	02	02	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	2. Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah bidang perbendaharaan	- Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Laporan	55.791.300,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		20 Laporan	61.468.000,00
5	02	02	2.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	2. Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah bidang perbendaharaan	- Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Dokumen	5.915.000,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		5 Dokumen	6.506.500,00
5	02	02	2.02	0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	2. Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah bidang perbendaharaan	- Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	83.633.000,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		12 Dokumen	91.996.300,00
5	02	02	2.02	0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	2. Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah bidang perbendaharaan	- Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	18.071.000,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	19.878.100,00
5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah				287.247.960,00				329.328.049,00

5	0 2	0 2	2. 0 3	00 02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	3. Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah bidang akuntansi	- Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	102 Dokumen	41.108.100,0 0	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		102 Dokumen	49.640.681, 00
5	0 2	0 2	2. 0 3	00 04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	3. Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah bidang akuntansi	- Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	336 Laporan	75.276.700,0 0	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		336 Laporan	87.227.681, 00
5	0 2	0 2	2. 0 3	00 05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	3. Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah bidang akuntansi	- Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	57.545.800,0 0	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	63.303.900, 00
5	0 2	0 2	2. 0 3	00 09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	3. Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah bidang akuntansi	- Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	31.100.000,0 0	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	38.631.441, 00
5	0 2	0 2	2. 0 3	00 11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	3. Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah bidang akuntansi	- Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	204 Orang	82.217.360,0 0	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		204 Orang	90.524.346, 00
5	0 2	0 2	2. 0 4		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah				5.000.000,00 0,00				7.000.000,0 00,00

5	0	0	2.	00	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	2. Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah bidang perbendaharaan	- Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	5.000.000,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	7.000.000,00
5	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				1.106.331,36				1.239.727,30
5	0	0	2.		Pengelolaan Barang Milik Daerah				1.106.331,36				1.239.727,30
5	0	0	2.	00	Penyusunan Standar Harga	Cakupan pengelolaan barang milik daerah	- Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	44.009.200,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	48.410.340,00
5	0	0	2.	00	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Cakupan pengelolaan barang milik daerah	- Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7 Dokumen	19.034.900,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		7 Dokumen	23.446.500,00
5	0	0	2.	00	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Cakupan pengelolaan barang milik daerah	- Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	209.277.900,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	244.288.294,00
5	0	0	2.	00	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Cakupan pengelolaan barang milik daerah	- Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	56.495.400,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	62.145.000,00
5	0	0	2.	00	Pengamanan Barang Milik Daerah	Cakupan pengelolaan barang milik daerah	- Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	328.062.600,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	360.868.970,00

5	0 2	0 3	2. 0 1	00 08	Penilaian Barang Milik Daerah	Cakupan pengelolaan barang milik daerah	- Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Laporan	242.951.900,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		5 Laporan	268.919.200,00
5	0 2	0 3	2. 0 1	00 10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Cakupan pengelolaan barang milik daerah	- Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	75.195.866,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		4 Dokumen	82.715.600,00
5	0 2	0 3	2. 0 1	00 12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Cakupan pengelolaan barang milik daerah	- Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14 Laporan	95.694.000,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		14 Laporan	109.762.602,00
5	0 2	0 3	2. 0 1	00 13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Cakupan pengelolaan barang milik daerah	- Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200 Orang	35.609.600,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		200 Orang	39.170.800,00
5	0 2	0 4			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				2.388.027.800,00				2.996.917.661,00
5	0 2	0 4	2. 0 1		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				2.388.027.800,00				2.996.917.661,00
5	0 2	0 4	2. 0 1	00 01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	- Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1.581.585.600,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	1.866.889.651,00
5	0 2	0 4	2. 0 1	00 03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	- Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	17.640.300,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		4 Laporan	19.404.600,00

5	0	0	2.	00	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	- Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17 Laporan	68.984.700,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		17 Laporan	75.883.500,00
5	0	0	2.	00	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	- Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1200 Obyek Pajak	24.179.700,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		1200 Obyek Pajak	26.598.000,00
5	0	0	2.	00	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	- Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36000 Dokumen	67.417.000,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		36000 Dokumen	74.158.920,00
5	0	0	2.	00	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	- Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	7.878.900,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		12 Dokumen	8.666.790,00
5	0	0	2.	00	Penagihan Pajak Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	- Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Dokumen	387.515.900,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		10 Dokumen	669.207.600,00
5	0	0	2.	00	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	- Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	116.355.300,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		12 Dokumen	127.990.940,00
5	0	0	2.	00	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	- Kota Magelang, Semua Kecamatan	4 Laporan	80.213.600,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		4 Laporan	88.235.180,00

							n, Semua Kel/Desa						
5	0 2	0 4	2. 0 1	00 15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	- Kota Magelang, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	1 Laporan	36.256.800,0 0	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	39.882.480, 00
TOTAL									21.512.142.1 1100				24.903.670. 854,00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Setelah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) maka disusunlah Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang tahun 2024. Renja disusun untuk memudahkan mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah pada tahun 2024. Renja ini dibuat sebagai implementasi dari tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah sebagaimana yang tertuang dalam Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang tahun 2021-2026.

Pendanaan program dan kegiatan didasarkan pada program dan kegiatan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Merealisasikan perencanaan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja Tahun 2024 dan perkiraan Tahun 2025, maka ditetapkan anggaran untuk mendanai program dan kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang berdasarkan Indikator kerja dan sasaran kerja yang dijabarkan dalam pencapaian Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang berdasarkan pagu indikatif.

Berikut merupakan tabel yang menggambarkan rencana kerja dan pendanaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang pada tahun 2024 dan telah dijabarkan pula ke dalam target dan pagu indikatif per triwulan:

Tabel 4. 1
Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegi atan	Indikator Kinerja Program/Kegi atan	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Kinerja Renja 2024 (Tahun n)	
			Target Kinerja	Pagu Indika tif	Targe t Kiner ja	Pagu Indikati f	Target Kinerja	Pagu Indikati f	Tar get Kin erja	Pagu Indikatif	Targe t Kinerj a	Pagu Indikati f
1	2	3	4		5		6		7		8	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA N											21.512. 142.111 ,00
5 0 2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA N DAERAH KABUPATEN /KOTA	Tingkat pemenuhan kebutuhan (TPK) perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang	25%	2,880, 452,45 6.25	25%	2,880,4 52,456. 25	25%	2,880,4 52,456. 25	25%	2,880,45 2,456.25	100%	

						urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan.											
5	0	0	2	0		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan ketersediaan (CK) dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD							33.666.400,00			
5	0	0	2	0		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2	2,174,425.00	2	2,174,425.00	1	2,174,425.00	1	2,174,425.00	6 Dokumen	8.697.700,00
5	0	0	2	0		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	713,750.00	0	713,750.00	0	713,750.00	0	713,750.00	1 Dokumen	2.855.000,00
5	0	0	2	0		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan	1	672,200.00	0	672,200.00	0	672,200.00	0	672,200.00	1 Dokumen	2.688.800,00

			01	Perubahan RKA-SKPD	RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
5	02	01	204	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	0	829,225.00	0	829,225.00	0	829,225.00	1 Dokumen	3.316.900,00
5	02	01	205	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	0	867,750.00	0	867,750.00	0	867,750.00	1 Dokumen	3.471.000,00
5	02	01	206	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan	7	7	3,159,250.00	8	3,159,250.00	8	3,159,250.00	30 Laporan	12.637.000,00

					Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triw ulanan /Semesteran SKPD										
5	0	0	2		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan laporan (CL) administrasi kepegawaian PD sesuai aturan										1.994.3 00,00
5	0	0	2	0	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3	498,57 5.00	3	498,575 .00	3	498,575 .00	3	498,575. 00	12 Doku men	1.994.3 00,00
5	0	0	2		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Ketersediaan (CK) administrasi umum Perangkat Daerah										153.360 .900,00
5	0	0	2	0	Penyediaan Komponen	Jumlah paket komponen	5	1,494, 925.00	5	1,494,9 25.00	5	1,494,9 25.00	5	1,494,92 5.00	20 Paket	5.979.7 00,00

			06	Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan										
5	02	01	2046	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	20	5,701,650.00	20	5,701,650.00	20	5,701,650.00	20	5,701,650.00	80 Paket	22.806.600,00
5	02	01	2056	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3	2,391,750.00	3	2,391,750.00	3	2,391,750.00	5	2,391,750.00	13 Paket	9.567.000,00
5	02	01	2066	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	1,350,000.00	1	1,350,000.00	1	1,350,000.00	0	1,350,000.00	3 Dokumen	5.400.000,00
5	02	01	2076	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	7	1,731,900.00	7	1,731,900.00	8	1,731,900.00	8	1,731,900.00	31 Paket	6.927.600,00
5	02	01	2086	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3	3,705,000.00	3	3,705,000.00	4	3,705,000.00	4	3,705,000.00	14 Laporan	14.820.000,00

5	0	0	2	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9	21,965,000.00	9	21,965,000.00	9	21,965,000.00	9	21,965,000.00	36 Laporan	87.860.000,00
5	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang (CPJP) Urusan Pemerintahan Daerah										490.635.194,00
5	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	900	18,672,890.00	900	18,672,890.00	900	18,672,890.00	900	18,672,890.00	3600 Laporan	74.691.560,00
5	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	78,962,271.00	3	78,962,271.00	3	78,962,271.00	3	78,962,271.00	12 Laporan	315.849.084,00

5	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	3	25,023 ,637.5 0	3	25,023, 637.50	3	25,023, 637.50	3	25,023,6 37.50	12 Lapor an	100.094 .550,00
5	0	0	2	0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah (CPBMD) penunjang urusan pemerintahan daerah										1.393.3 71.760, 00
5	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6	60,521 ,900.0 0	6	60,521, 900.00	6	60,521, 900.00	6	60,521,9 00.00	24 Unit	242.087 .600,00
5	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12	79,963 ,125.0 0	12	79,963, 125.00	13	79,963, 125.00	13	79,963,1 25.00	50 Unit	319.852 .500,00

					Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya								
5	0	0	2	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	24	17,476,250.00	24	17,476,250.00	24	17,476,250.00	24	96 Unit 69.905.000,00
5	0	0	2	0	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang dipelihara	1	30,675,000.00	1	30,675,000.00	1	30,675,000.00	0	3 Unit 122.700.000,00
5	0	0	2	0	Pemeliharaan/ Rehabili tasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2	159,706,665.00	2	159,706,665.00	2	159,706,665.00	3	9 Unit 638.826.660,00
5	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	DO : Cakupan Penyediaan Dokumen Perencanaan Anggaran, pelayanan penatausahaan keuangan, dan laporan keuangan yang secara tepat waktu dan sesuai dengan								6.523.278.320,00

5	0	0	2	0	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	7	2,434, 450.00	7	2,434,4 50.00	7	2,434,4 50.00	7	2,434,45 0.00	28 Doku men	9.737.8 00,00
5	0	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1	50,339 ,440.0 0	1	50,339, 440.00	0	50,339, 440.00	0	50,339,4 40.00	2 Doku men	201.357 .760,00
5	0	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan	1	46,954 ,025.0 0	1	46,954, 025.00	0	46,954, 025.00	0.5	46,954,0 25.00	2 Doku men	187.816 .100,00

5	0	0	2	0	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaa n Pembiayaan Daerah	28	2,495, 725.00	28	2,495,7 25.00	28	2,495,7 25.00	28	2,495,72 5.00	112 Doku men	9.982.9 00,00
5	0	0	2	0	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	3	2,779, 250.00	3	2,779,2 50.00	3	2,779,2 50.00	3	2,779,25 0.00	12 Doku men	11.117. 000,00
5	0	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/P	5	13,947 ,825.0	5	13,947, 825.00	5	13,947, 825.00	5	13,947,8 25.00	20 Lapor an	55.791. 300,00

					Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	emotonga dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/P emotonga dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)										
5	0	0	2	0	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta	1	1,478, 750.00	1	1,478,7 50.00	1	1,478,7 50.00	2	1,478,75 0.00	5 Doku men	5.915.0 00,00

					atas SP2D dengan Instansi Terkait	Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait												
5	0	0	2	1	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	3	20,908,250.00	3	20,908,250.00	3	20,908,250.00	3	20,908,250.00			12 Dokumen	83.633.000,00
5	0	0	2	3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase LK OPD yang sesuai dengan ketentuan												287.247.960,00

5	0	0	2	0	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	25	10,277,025.00	25	10,277,025.00	25	10,277,025.00	27	10,277,025.00	102 Dokumen	41.108.100,00
5	0	0	2	0	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	84	18,819,175.00	84	18,819,175.00	84	18,819,175.00	84	18,819,175.00	336 Laporan	75.276.700,00
5	0	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan	1	14,386,450.00	1	14,386,450.00	0	14,386,450.00	0	14,386,450.00	2 Dokumen	57.545.800,00

					Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota										
5	0	0	2	0	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD										
5	0	0	2	0	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1	7,775,000.00	0	7,775,000.00	0	7,775,000.00	0	7,775,000.00	1 Dokumen	31.100.000,00
5	0	0	2	0	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan	51	20,554,340.00	51	20,554,340.00	51	20,554,340.00	51	20,554,340.00	204 Orang	82.217.360,00

				Pemerintah Kabupaten/Kota	Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota											
5	0	0	2	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku									5.000.000,00		
5	0	0	2	9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	3	1,250,000,00	3	1,250,000,00	3	1,250,000,00	3	1,250,000,00	12 Laporan	5.000.000,00
5	0	0	3		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Cakupan Pengelolaan BMD									1.106.331.366,00	
5	0	0	2	3	1	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Cakupan perencanaan, pemanfaatan, pengamanan, penatausahaan, dan pemindahtanganan BMD								1.106.331.366,00	

5	0	0	2	1	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun Jumlah Standar Harga yang Disusun	0	11,002,300.00	0	11,002,300.00	1	11,002,300.00	1	11,002,300.00	2 Dokumen	44.009.200,00
5	0	0	2	2	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah										
5	0	0	2	3	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1	4,758,725.00	1	4,758,725.00	2	4,758,725.00	3	4,758,725.00	7 Dokumen	19.034.900,00
5	0	0	2	5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	0	52,319,475.00	0	52,319,475.00	0	52,319,475.00	1	52,319,475.00	1 Laporan	209.277.900,00
5	0	0	2	6	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	0	14,123,850.00	0	14,123,850.00	0	14,123,850.00	1	14,123,850.00	1 Laporan	56.495.400,00
5	0	0	2	7	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan	3	82,015,650.00	3	82,015,650.00	3	82,015,650.00	3	82,015,650.00	12 Laporan	328.062.600,00

			01	Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota									
5	02	04		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah									2.388.027.800,00
5	02	04	201	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah									2.388.027.800,00
5	02	04	201	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1	395,396,400.00	0	395,396,400.00	0	395,396,400.00	1	395,396,400.00	1 Dokumen 1.581.585.600,00
5	02	04	203	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1	4,410,075.00	1	4,410,075.00	1	4,410,075.00	1	4,410,075.00	4 Laporan 17.640.300,00
5	02	04	206	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan,	4	17,246,175.00	4	17,246,175.00	4	17,246,175.00	5	17,246,175.00	17 Laporan 68.984.700,00

			0 1	Basis Data Pajak Daerah	Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah											
5	0	0	2 4 0 1	7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	300	6,044,925.00	300	6,044,925.00	300	6,044,925.00	300	6,044,925.00	1200 Obyek Pajak	24.179.700,00
5	0	0	2 4 0 1	8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	9000	16,854,250.00	9000	16,854,250.00	9000	16,854,250.00	9000	16,854,250.00	36000 Dokumen	67.417.000,00
5	0	0	2 4 0 1	1 0	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	3	1,969,725.00	3	1,969,725.00	3	1,969,725.00	3	1,969,725.00	12 Dokumen	7.878.900,00
5	0	0	2 4 0 1	1 1	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	2	96,878,975.00	2	96,878,975.00	3	96,878,975.00	3	96,878,975.00	10 Dokumen	387.515.900,00

5	0	0	2	1	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	3	29,088,825.00	3	29,088,825.00	3	29,088,825.00	3	29,088,825.00	12 Dokumen	116.355.300,00
5	0	0	2	1	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	1	20,053,400.00	1	20,053,400.00	1	20,053,400.00	1	20,053,400.00	4 Laporan	80.213.600,00
5	0	0	2	1	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	0	9,064,200.00	0	9,064,200.00	0	9,064,200.00	1	9,064,200.00	1 Laporan	36.256.800,00

BAB V PENUTUP

Renja merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun anggaran dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat Daerah. Di samping itu Renja juga berfungsi untuk meninjau kembali hasil capaian kinerja Perangkat Daerah di tahun sebelumnya. Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2024 ini disusun berdasarkan Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang tahun 2021-2026 dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Magelang tahun 2024.

Penyusunan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang sebagai upaya mendukung visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Kota Magelang. Pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis, baik dalam lingkup Pemerintah Kota Magelang maupun di Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah. Komitmen dan dukungan dari seluruh ASN di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang sangat dibutuhkan dalam rangka menjamin terlaksananya rencana program dan kegiatan yang disusun di dalam Renja Tahun 2024 ini serta dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien serta mampu memberikan kontribusi positif untuk mewujudkan peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah serta Kemandirian Keuangan Daerah di Kota Magelang.

Magelang, Juli 2023

KEPALA BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA MAGELANG



SUSLOWATI, SE, MT, M.Sc
-- Pembina Utama Muda
NIP. 19721101 199803 2 008



WALI KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA MAGELANG
NOMOR 050.29/149/112 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA MAGELANG TAHUN 2023

WALI KOTA MAGELANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan amanat ketentuan dalam Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2023.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
- a. mempersiapkan dan mengumpulkan materi kebijakan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2023;
 - b. melaksanakan seluruh pengadministrasian pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2023;
 - c. melaksanakan analisis dan menyusun dokumen penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2023;
 - d. melaporkan hasilnya dan bertanggungjawab kepada Wali Kota.
- KETIGA : Apabila dalam keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdapat kekosongan pejabat karena sesuatu hal, maka penjabat/pelaksana tugas dari jabatan tersebut mempunyai kewenangan dan hak yang sama dengan pejabat definitif.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 23 Mei 2023

WALI KOTA MAGELANG,

MUCHAMAD NUR AZIZ



LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA MAGELANG
NOMOR 05021/195/112 TAHUN 2023
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA MAGELANG TAHUN 2023

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang	Ketua
3.	Kepala Subbagian Program dan Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang	Wakil Ketua
4.	1 (satu) orang Analis Perencanaan Program pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang	Sekretaris
5.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang	Anggota
6.	Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang	Anggota
7.	Kepala Bidang Pendapatan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang	Anggota
8.	Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang	Anggota
9.	Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang	Anggota

WALI KOTA MAGELANG,

MUCHAMMAD NUR AZIZ



PEMERINTAH KOTA MAGELANG



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. Jend. Sarwo Edi Wibowo No. 2 Telp. (0293) 363695 (5 lines) Fax : (0293) 364910
MAGELANG
56101

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
NOMOR : 188/ 23 /440/2022

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MAGELANG

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang.

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/20/M.PAN/141/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata

- Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 (Nomor 1538));
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026;
 11. Peraturan Walikota Magelang Nomor 86 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tentang Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang.

KESATU : Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran ini merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2021 – 2026.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, disusun dengan mengacu pada kesesuaian dalam pencapaian sasaran strategis dan kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Magelang Tahun 2021-2026 dengan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Magelang

Pada Tanggal : 7 Januari 2022

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KOTA MAGELANG



SUSILOWATI

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Badan
Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kota Magelang

Nomor : 188 /23/440/2022

Tanggal : 7 Januari 2022

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang

Tugas :

- a. merumuskan dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- b. mengoordinasikan dan mengarahkan pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- c. mengoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan program dan kegiatan pada Sekretariat dan Bidang-Bidang di bawahnya;
- d. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan Daerah dan pengelolaan barang milik Daerah berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- e. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- f. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD);
- g. melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang telah diatur dalam Perda;

- h. mengoordinasikan dan bertanggung jawab atas proses pengadaan barang/ jasa di lingkup Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. menyelenggarakan dan mengendalikan pengelolaan keuangan, kepegawaian dan barang milik Daerah, dan urusan umum di lingkup Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- j. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam pengelolaan keuangan Daerah dan pengelolaan barang milik Daerah;
- k. membina, mengarahkan, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- l. melaksanakan tertib administrasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Fungsi :

- a. perumusan rencana dan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan Daerah dan pengelolaan barang milik Daerah;
- b. pengoordinasian dan pengarahan dalam penyusunan program, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- c. pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan operasional di lingkup tugasnya.

TUJUAN RENSTRA	INDIKATOR TUJUAN RENSTRA	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET					SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6					7	8
Meningkatnya kualitas pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah	Persentase Capaian Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan Barang Milik Daerah			I = Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah II = Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah DO = (I+II)/2 x 100%	89,76%	91,09 %	92,03 %	93,69 %	93,87 %	Laporan Bidang-bidang pada BPKAD	Kepala BPKAD
		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (I)	A. Persentase Dokumen Penganggaran Daerah yang tepat waktu B. Persentase pencairan belanja sesuai pengajuan C. Presentase Pelaporan Keuangan sesuai SAP DO = (A+B+C)/3 x 100% A. Jumlah rancangan dokumen(RKUA, RPPAS; Raperda APBD, Raperwal APBD) tepat waktu dibandingkan dengan Jumlah rancangan dokumen penganggaran (RKUA, RPPAS; Raperda APBD, Raperwal APBD) x 100% B. Jumlah SP2D yang diterbitkan dibandingkan dengan Jumlah SPM yang diterima x 100% C. Jumlah Laporan Keuangan OPD yang sesuai dengan SAP dibandingkan dengan jumlah Laporan Keuangan seluruh OPD x 100%	89,76%	91,43 %	91,43 %	93,10 %	93,10 %	Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah dari Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan, dan Bidang Akuntansi, Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	Kepala BPKAD
		Meningkatnya kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah (II)	Persentase yang menunjukkan akuntabilitas pengelolaan BMD yang merupakan komposit dari nilai : A. Persentase BMD yang dimanfaatkan	89,77 %	90,76 %	92,64 %	94,29 %	94,64 %	Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah dari Bidang Aset	Kepala BPKAD

				<p>B. Persentase OPD dengan BMD yang sesuai Standar C. Persentase Pengamanan BMD D. Persentase Penatausahaan BMD yang Berkualitas E. Persentase BMD yang Dipindahtanggankan</p> <p>DO = (A+B+C+D+E)/5 x 100%</p> <p>Merupakan komposit dari nilai indikator Persentase BMD yang dimanfaatkan, Persentase OPD dengan BMD sesuai standar, Persentase pengamanan BMD, Persentase penatausahaan BMD yang berkualitas, Persentase BMD yang dipindahtanggankan dibagi 5 (lima) dan dikalikan 100 (seratus) persen</p>							
Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah			<p>Jumlah Anggaran PAD dibandingkan dengan jumlah anggaran yang diterima dari transfer pusat (Dana Perimbangan) dan Transfer provinsi serta Pinjaman Daerah</p> <p>A. Anggaran PAD B. Anggaran Transfer Pusat C. Anggaran Transfer Provinsi D. Anggaran Pinjaman</p> <p>$DO = \frac{A}{(B + C + D)} \times 100\%$</p>	36,16%	34,61 %	35,64 %	36,69 %	36,69 %	Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Pendapatan Daerah	Kepala BPKAD
		Meningkatnya Pendapatan daerah	Rasio PAD terhadap pendapatan daerah	<p>Merupakan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah dengan jumlah Pendapatan Daerah</p> <p>A. Jumlah Pendapatan Asli Daerah B. Jumlah Pendapatan Daerah</p> <p>DO = (A/B) x 100%</p>	26,05%	25,25 %	25,81 %	26,37 %	26,37 %	Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Pendapatan Daerah	Kepala BPKAD

				Merupakan komposit dari capaian indikator Persentase Peningkatan Potensi PAD (A) dan Persentase Peningkatan Realisasi PAD (B) dibagi 2 dikali 100%								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KOTA MAGELANG



SUSILOWATI